

## Diplomasi Soft Power Berbasis Nilai Lokal: Peran United In Diversity dalam Internasionalisasi Tri Hita Karana

I Gede Putra Restyawan<sup>1</sup> Dr. Putu Titah Kawitri Resen, S.IP.,M.A.<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Mahasiswa Hubungan Internasional, Universitas Udayana, Indonesia, [putrarestyaw41@gmail.com](mailto:putrarestyaw41@gmail.com)

<sup>2</sup>Dosen Hubungan Internasional, Universitas Udayana, Indonesia, [kawitriresen@unud.ac.id](mailto:kawitriresen@unud.ac.id)

### Abstrak

Tulisan ini mengkaji peran aktor non-negara, khususnya organisasi non-pemerintah United In Diversity (UID) Indonesia, dalam mempraktikkan diplomasi soft power melalui internasionalisasi nilai lokal Tri Hita Karana. Selama ini, kajian diplomasi Indonesia cenderung menempatkan negara sebagai aktor utama, sementara kontribusi NGO dalam penyebaran nilai dan pembentukan citra nasional masih relatif terbatas dibahas. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana UID memanfaatkan Tri Hita Karana sebagai sumber daya soft power serta menganalisis proses konstruksi makna dan identitas Indonesia di tingkat global. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui studi kasus terhadap kegiatan Tri Hita Karana Forum, didukung oleh studi literatur dan observasi terhadap dokumen resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UID berperan sebagai penghubung lintas sektor yang mampu menerjemahkan nilai spiritual dan budaya lokal ke dalam narasi universal pembangunan berkelanjutan. Praktik ini tidak hanya memperluas ruang diplomasi di luar negara, tetapi juga memperkuat citra Indonesia sebagai bangsa yang menjunjung harmoni dan keberlanjutan dalam tata kelola global.

*Kata Kunci: Diplomasi Soft Power, Aktor Non-Negara, Tri Hita Karana, United In Diversity, Konstruktivisme*

### Abstract

*This article analyzed non state actor's role, especially Non-Governmental Organization such as United In Diversity (UID) Indonesia, in practicing soft power diplomacy through the internationalization of local values known as Tri Hita Karana. Existing studies on Indonesian diplomacy tend to emphasize the role of the state, while the contribution of NGOs in disseminating values and shaping national image remains underexplored. This research aims to explain how UID utilizes Tri Hita Karana as a soft power resource and to analyze the process of meaning and identity construction at the global level. Employing a qualitative descriptive-analytical method with a case study approach, this study draws on literature review and observation of official documents related to the Tri Hita Karana Forum. The findings reveal that UID acts as a cross-sectoral intermediary capable of translating local spiritual and cultural values into a universal narrative of sustainable development. This practice demonstrates that diplomacy is no longer monopolized by states and contributes to strengthening Indonesia's image as a country that promotes harmony and sustainability in global governance.*

*Keywords: Soft Power Diplomacy, Non-State Actors, Tri Hita Karana, United In Diversity, Constructivism*

## Pendahuluan

Perubahan dinamika hubungan internasional pada era globalisasi menunjukkan bahwa praktik diplomasi tidak lagi sepenuhnya bersifat negara-sentris. Pergeseran fokus dari isu-isu *high politics* seperti keamanan dan militer menuju *low politics*—termasuk pembangunan berkelanjutan, perubahan iklim, dan tata kelola global—telah memperluas ruang interaksi internasional. Kondisi ini membuka peluang partisipasi yang lebih besar bagi aktor non-negara, khususnya organisasi non-pemerintah (NGO). Keberadaan aktor-aktor tersebut turut memengaruhi proses perumusan agenda dan norma global. Dalam konteks ini, diplomasi tidak hanya dimaknai sebagai aktivitas formal antarnegara. Diplomasi juga dipahami sebagai proses sosial yang melibatkan pertukaran nilai, norma, dan gagasan di tingkat internasional.

Sejalan dengan perkembangan tersebut, konsep *soft power* menjadi semakin relevan dalam menjelaskan mekanisme pengaruh dalam politik internasional. Nye (2004) menyatakan bahwa daya tarik yang bersumber dari budaya, nilai, dan kebijakan yang dipersepsikan sah mampu menciptakan pengaruh jangka panjang. Pengaruh ini dinilai lebih berkelanjutan dibandingkan penggunaan kekuatan koersif atau tekanan militer. Pendekatan *soft power* menekankan pentingnya persuasi dan legitimasi dalam hubungan antaraktor internasional. Dalam kerangka ini, aktor non-negara memiliki peluang signifikan untuk terlibat dalam praktik diplomasi. Kontribusi tersebut terutama dilakukan melalui penyebaran nilai, advokasi isu global, serta pembentukan persepsi positif di tingkat internasional.

Di Indonesia, pembahasan mengenai diplomasi masih banyak menggunakan pendekatan negara-sentris yang menempatkan pemerintah sebagai aktor utama. Pendekatan ini menyebabkan kontribusi aktor non-negara dan nilai-nilai lokal sering kali kurang mendapat perhatian. Padahal, Indonesia memiliki beragam nilai kearifan lokal yang berpotensi menjadi sumber *soft power*. Salah satu nilai tersebut adalah Tri Hita Karana, yang menekankan pentingnya keharmonisan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama, dan manusia dengan alam. Nilai ini mencerminkan pandangan hidup yang seimbang dan berkelanjutan. Oleh karena itu, Tri Hita Karana memiliki relevansi yang kuat dengan wacana global mengenai pembangunan berkelanjutan dan perlindungan lingkungan.

Internasionalisasi Tri Hita Karana tidak hanya dilakukan melalui kebijakan negara, tetapi juga melalui keterlibatan aktor non-negara dalam forum dan inisiatif global. Salah satu wujud konkret dari proses ini adalah penyusunan *Tri Hita Karana Roadmap for Blended Finance*, sebuah dokumen normatif yang mengaitkan nilai Tri Hita Karana dengan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Dokumen ini menunjukkan bagaimana nilai lokal Indonesia dapat diartikulasikan ke dalam bahasa universal yang dapat diterima oleh komunitas internasional. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran aktor non-negara dalam diplomasi *soft power* berbasis nilai lokal melalui studi kasus internasionalisasi Tri Hita Karana. Penelitian ini juga berupaya menjelaskan bagaimana nilai lokal dikonstruksikan menjadi norma global melalui interaksi sosial dalam perspektif konstruktivisme. Dengan

demikian, tulisan ini diharapkan dapat memperkaya kajian hubungan internasional, khususnya mengenai diplomasi nilai dan peran NGO dalam politik global.

## **Metode**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk memahami fenomena yang diteliti secara mendalam. Artikel ini merupakan hasil penelitian berbasis studi kasus yang berfokus pada United In Diversity (UID) Indonesia serta penyelenggaraan Tri Hita Karana Forum. Pendekatan studi kasus dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengkaji praktik diplomasi nilai secara kontekstual dan spesifik. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur terhadap buku, jurnal akademik, laporan organisasi internasional, serta dokumen resmi yang diterbitkan oleh UID dan mitra terkait. Data sekunder tersebut digunakan untuk memperkuat landasan konseptual dan empiris penelitian. Selain itu, penelitian ini juga didukung oleh observasi terhadap narasi, agenda, dan keluaran forum yang berkaitan dengan proses internasionalisasi nilai Tri Hita Karana.

Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan kerangka teori *soft power* dan konstruktivisme. Penggunaan kedua pendekatan ini bertujuan untuk memahami bagaimana mekanisme pengaruh dijalankan melalui daya tarik nilai dan ide. Selain itu, kerangka konstruktivisme membantu menjelaskan proses interaksi sosial yang membentuk makna dan identitas di tingkat internasional. Analisis difokuskan pada cara nilai Tri Hita Karana dikonstruksikan dan disebarluaskan melalui forum internasional. Pendekatan ini dinilai relevan untuk melihat peran aktor non-negara dalam praktik diplomasi kontemporer. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai diplomasi nilai dalam konteks global.

## **Hasil dan Pembahasan**

Bagian hasil dan pembahasan ini bertujuan untuk menguraikan temuan penelitian secara analitis dengan menempatkan praktik United In Diversity (UID) dalam kerangka diplomasi *soft power* dan peran aktor non-negara dalam hubungan internasional. Analisis dilakukan untuk melihat bagaimana nilai lokal dapat beroperasi dalam ruang diplomasi global yang semakin terbuka. Secara umum, hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik internasionalisasi nilai Tri Hita Karana yang difasilitasi oleh UID tidak sekadar menjadi upaya promosi budaya Indonesia. Praktik tersebut juga mencerminkan karakter diplomasi kontemporer yang semakin menekankan pendekatan berbasis nilai. Selain itu, diplomasi ini dijalankan melalui kolaborasi lintas sektor dan interaksi non-formal. Kondisi ini menunjukkan adanya pergeseran pola diplomasi dari yang bersifat negara-sentris menuju pendekatan yang lebih inklusif.

Temuan utama penelitian memperlihatkan bahwa diplomasi yang dijalankan oleh UID bersifat non-formal dan tidak berorientasi pada aktor negara. Meskipun demikian, praktik tersebut tetap memiliki implikasi strategis terhadap citra dan posisi Indonesia di tingkat internasional. UID berperan sebagai perantara normatif yang menjembatani nilai lokal dengan agenda global. Peran ini terlihat jelas dalam upaya mengaitkan nilai Tri Hita Karana dengan kerangka Sustainable Development Goals (SDGs). Melalui penyelenggaraan forum internasional dan penyusunan dokumen normatif, nilai tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa yang bersifat universal. Proses ini menegaskan bahwa diplomasi nilai tidak hanya berlangsung melalui kebijakan luar negeri resmi, tetapi juga melalui interaksi sosial dan institusional yang difasilitasi oleh aktor non-negara.

Pembahasan dalam bagian ini juga menunjukkan bahwa efektivitas diplomasi nilai yang dijalankan oleh UID sangat bergantung pada pola interkoneksi multi-sektor yang dibangun. Keterlibatan

pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan organisasi internasional membentuk ekosistem kolaboratif yang memperkuat legitimasi nilai yang dipromosikan. Kolaborasi lintas sektor ini memungkinkan nilai Tri Hita Karana menjangkau audiens global yang lebih luas. Namun, interkoneksi tersebut juga menghadirkan tantangan tersendiri. Kompleksitas relasi kekuasaan dan perbedaan kepentingan antaraktor menjadi faktor yang tidak dapat diabaikan. Oleh karena itu, diplomasi nilai perlu dipahami sebagai arena negosiasi yang dinamis antara idealisme normatif dan kepentingan institusional.

Secara kritis, hasil penelitian juga mengindikasikan bahwa posisi UID sebagai yayasan membuka kemungkinan adanya kepentingan non-publik yang memengaruhi proses internasionalisasi nilai. Meskipun UID berkontribusi positif dalam mempromosikan nilai keberlanjutan dan harmoni, keberadaan mitra strategis dan donor berpotensi membentuk prioritas narasi dan arah program. Oleh karena itu, pembahasan dalam bagian ini tidak hanya menekankan keberhasilan diplomasi nilai oleh UID, tetapi juga menyoroti batas-batas dan tantangan yang melekat pada peran aktor non-negara dalam diplomasi global.

Dengan kerangka tersebut, sub-bab pembahasan selanjutnya akan mengelaborasi temuan penelitian secara lebih rinci. Analisis akan dimulai dengan penjelasan konseptual mengenai diplomasi soft power dan peran aktor non-negara, dilanjutkan dengan pembahasan mengenai UID sebagai aktor diplomasi nilai, serta diakhiri dengan analisis kritis mengenai internasionalisasi Tri Hita Karana, interkoneksi multi-sektor, dan dinamika kepentingan dalam praktik diplomasi nilai. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif dan reflektif mengenai peran NGO dalam hubungan internasional kontemporer.

#### **a. Diplomasi Soft Power dan Peran Aktor Non-Negara**

Perkembangan hubungan internasional pada era globalisasi menunjukkan adanya pergeseran signifikan dalam cara aktor-aktor internasional menjalankan diplomasi. Jika pada masa Perang Dingin diplomasi lebih banyak dipahami sebagai aktivitas negara yang bertumpu pada kekuatan militer dan kapasitas ekonomi, maka pada konteks kontemporer diplomasi mengalami perluasan makna. Diplomasi tidak lagi dimonopoli oleh negara sebagai aktor tunggal, melainkan melibatkan berbagai aktor non-negara yang turut berperan dalam membentuk agenda, norma, dan persepsi di tingkat global. Perubahan ini dipicu oleh semakin kompleksnya isu-isu global yang tidak dapat diselesaikan melalui pendekatan koersif semata, seperti perubahan iklim, pembangunan berkelanjutan, kemiskinan, dan ketimpangan sosial.

Dalam situasi tersebut, konsep soft power menjadi semakin relevan sebagai kerangka analisis untuk memahami mekanisme pengaruh dalam hubungan internasional. Joseph S. Nye mendefinisikan soft power sebagai kemampuan suatu aktor untuk memengaruhi pihak lain melalui daya tarik, bukan melalui paksaan atau imbalan material (Nye, 2004). Daya tarik ini bersumber dari nilai-nilai yang dianut, budaya yang dipraktikkan, serta kebijakan yang dipersepsikan sah dan bermoral oleh pihak lain. Berbeda dengan hard power yang bersifat memaksa dan sering kali menimbulkan resistensi, soft power bekerja secara halus melalui proses persuasi, legitimasi, dan pembentukan preferensi.

Relevansi soft power dalam hubungan internasional kontemporer tidak terlepas dari meningkatnya interdependensi global. Dalam dunia yang semakin saling terhubung, penggunaan kekuatan koersif justru berpotensi menimbulkan dampak negatif jangka panjang, seperti menurunnya kepercayaan internasional dan rusaknya reputasi aktor yang menggunakannya. Sebaliknya, kemampuan untuk membangun citra positif dan menarik dukungan melalui nilai dan norma dianggap lebih efektif dalam menciptakan pengaruh yang berkelanjutan. Oleh karena itu, soft power menjadi instrumen penting dalam diplomasi modern, terutama dalam konteks isu-isu non-tradisional yang membutuhkan kerja sama lintas batas.

Dalam praktiknya, soft power tidak hanya dimiliki oleh negara, tetapi juga oleh aktor non-negara. Organisasi non-pemerintah (NGO), organisasi internasional, komunitas epistemik, hingga sektor swasta memiliki kapasitas untuk membentuk wacana dan memengaruhi agenda global melalui penyebaran nilai dan ide. Keberadaan aktor-aktor ini memperluas ruang diplomasi di luar jalur formal antarnegara. Diplomasi tidak lagi terbatas pada pertemuan resmi pemerintah, melainkan juga berlangsung melalui forum, jaringan, dan inisiatif kolaboratif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Jan Melissen (2005) menegaskan bahwa diplomasi publik dan diplomasi non-negara menjadi bagian penting dari praktik hubungan internasional di masa kini. Diplomasi tidak hanya bertujuan menyampaikan kepentingan nasional, tetapi juga membangun hubungan jangka panjang dengan audiens global. Dalam konteks ini, penyebaran nilai dan norma menjadi strategi utama untuk memperoleh legitimasi dan kepercayaan internasional. Hal ini menunjukkan bahwa soft power tidak sekadar alat pelengkap, melainkan telah menjadi elemen sentral dalam diplomasi modern.

Isu pembangunan berkelanjutan dan Sustainable Development Goals (SDGs) menjadi salah satu arena utama di mana soft power memainkan peran penting. Agenda SDGs bersifat universal dan normatif, sehingga keberhasilannya sangat bergantung pada penerimaan dan partisipasi berbagai aktor. Tidak ada satu negara pun yang mampu mencapai tujuan-tujuan tersebut secara mandiri. Oleh karena itu, diplomasi dalam konteks SDGs menuntut pendekatan kolaboratif yang menekankan kesamaan nilai, kepentingan bersama, dan tanggung jawab kolektif. Dalam situasi ini, soft power berbasis nilai menjadi instrumen yang relevan untuk membangun konsensus dan mendorong kerja sama lintas sektor.

NGO memiliki posisi strategis dalam praktik diplomasi soft power karena karakteristiknya yang relatif fleksibel, non-hierarkis, dan dekat dengan masyarakat. Berbeda dengan negara yang sering kali terikat oleh kepentingan politik dan birokrasi, NGO dapat beroperasi sebagai aktor normatif yang menekankan nilai moral, etika, dan kepentingan publik global. Melalui advokasi, pendidikan, dan forum dialog, NGO berkontribusi dalam membentuk pemahaman bersama mengenai isu-isu global. Peran ini menjadikan NGO sebagai agen penting dalam penyebaran soft power, khususnya dalam isu-isu pembangunan dan keberlanjutan.

Melihat potensi Indonesia, soft power berbasis nilai memiliki potensi yang besar. Indonesia dikenal sebagai negara dengan keragaman budaya dan nilai lokal yang kaya, yang dapat menjadi sumber daya soft power di tingkat global. Nilai-nilai seperti gotong royong, toleransi, dan harmoni antara manusia dan alam memiliki relevansi dengan diskursus global mengenai pembangunan berkelanjutan dan tata kelola yang inklusif. Namun, potensi tersebut tidak selalu disalurkan secara optimal melalui diplomasi negara. Di sinilah peran aktor non-negara menjadi penting dalam menerjemahkan nilai lokal ke dalam bahasa universal yang dapat diterima oleh komunitas internasional.

Perkembangan ini menunjukkan bahwa diplomasi soft power dalam dewasa ini bersifat multidimensional dan melibatkan berbagai aktor. Negara tetap memiliki peran sentral, tetapi bukan satu-satunya aktor yang menentukan arah diplomasi. NGO dan aktor non-negara lainnya berkontribusi dalam memperluas ruang diplomasi melalui pendekatan berbasis nilai dan norma. Dengan demikian, diplomasi tidak lagi dipahami semata-mata sebagai alat untuk mengejar kepentingan nasional secara sempit, melainkan sebagai proses sosial yang membentuk identitas, makna, dan kepentingan bersama di tingkat global.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa soft power merupakan konsep kunci untuk memahami dinamika diplomasi dalam hubungan internasional. Perubahan karakter isu global dan meningkatnya peran aktor non-negara menuntut pendekatan diplomasi yang lebih inklusif dan

kolaboratif. Dalam konteks ini, NGO memiliki peran penting sebagai agen penyebar nilai dan norma yang berkontribusi pada pembentukan persepsi dan preferensi global. Pemahaman ini menjadi landasan konseptual untuk menganalisis peran United In Diversity dan internasionalisasi nilai Tri Hita Karana dalam praktik diplomasi soft power Indonesia.

**b. Aktor Non-Negara dan Efektivitas NGO dalam Diplomasi Global**

Perkembangan hubungan internasional kontemporer ditandai oleh semakin beragamnya aktor yang terlibat dalam proses politik global. Negara tidak lagi menjadi satu-satunya aktor yang menentukan arah interaksi internasional, melainkan berbagi peran dengan aktor non-negara seperti organisasi internasional, perusahaan multinasional, komunitas epistemik, serta organisasi non-pemerintah (non-governmental organizations/NGO). Kehadiran aktor non-negara ini mencerminkan perubahan struktur sistem internasional yang semakin kompleks dan saling terhubung, terutama dalam menangani isu-isu lintas batas yang tidak dapat diselesaikan melalui pendekatan negara-sentris semata.

Aktor non-negara dapat dipahami sebagai entitas yang beroperasi di luar struktur formal negara, namun memiliki kapasitas untuk memengaruhi proses pengambilan keputusan dan pembentukan norma di tingkat internasional. Dalam literatur hubungan internasional, aktor non-negara sering kali diposisikan sebagai pelengkap peran negara, namun dalam praktiknya mereka justru kerap memainkan peran yang strategis. NGO, misalnya, berperan dalam advokasi kebijakan, produksi pengetahuan, serta penyebaran nilai dan norma yang membentuk agenda global. Peran ini menjadi semakin signifikan seiring dengan meningkatnya perhatian internasional terhadap isu-isu normatif seperti hak asasi manusia, lingkungan hidup, dan pembangunan berkelanjutan.

Efektivitas organisasi non-pemerintah (NGO) dalam diplomasi global tidak dapat diukur menggunakan parameter kekuasaan tradisional seperti kekuatan militer atau kapasitas ekonomi. Sebaliknya, kekuatan utama NGO terletak pada legitimasi moral yang dimilikinya. Selain itu, keahlian tematik dan kemampuan membangun jaringan lintas sektor menjadi sumber pengaruh yang signifikan. Berbagai studi menunjukkan bahwa NGO mampu memengaruhi arah kebijakan internasional melalui pendekatan berbasis nilai dan pengetahuan. Pengaruh tersebut dijalankan melalui produksi penelitian, penyusunan laporan, serta kampanye advokasi. Melalui aktivitas tersebut, NGO berperan dalam membingkai isu-isu global dan menawarkan alternatif solusi yang kerap menjadi rujukan bagi para pembuat kebijakan.

Dalam konteks diplomasi, NGO dapat berfungsi sebagai mediator yang menjembatani kepentingan berbagai aktor. Peran ini terlihat dalam upaya mereka menghubungkan pemerintah, sektor swasta, organisasi internasional, dan masyarakat sipil. Dengan posisi yang relatif independen, NGO mampu membuka ruang komunikasi yang lebih netral. Proses mediasi tersebut mendorong terciptanya dialog yang lebih inklusif dan partisipatif. Dalam banyak kasus, NGO juga bertindak sebagai katalis yang mempercepat terbentuknya kerja sama lintas sektor. Peran ini menjadi semakin penting dalam isu-isu global yang membutuhkan pendekatan kolaboratif, seperti perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan.

Literatur mengenai diplomasi NGO menekankan bahwa pengaruh organisasi non-pemerintah umumnya bersifat tidak langsung. Meskipun demikian, dampak yang dihasilkan cenderung berjangka panjang dan berkelanjutan. NGO tidak selalu terlibat secara langsung dalam proses pengambilan keputusan formal. Namun, mereka memengaruhi proses tersebut melalui pembentukan opini publik dan penguatan legitimasi normatif. Dalam berbagai negosiasi internasional, NGO sering berperan sebagai pengawas dan penyedia informasi. Dengan peran tersebut, NGO berkontribusi dalam

meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, sekaligus membentuk konteks normatif tempat keputusan politik diambil.

Kajian perbandingan mengenai efektivitas NGO juga menunjukkan bahwa keberhasilan organisasi non-pemerintah sangat dipengaruhi oleh konteks sosial dan politik tempat mereka beroperasi. NGO yang mampu menyesuaikan strategi dengan kebutuhan lokal dan membangun kemitraan yang kuat cenderung lebih efektif dalam mencapai tujuannya. Fleksibilitas organisasi dan kemampuan adaptasi menjadi faktor penting yang membedakan NGO dari aktor negara yang sering kali terikat oleh struktur birokrasi yang kaku. Hal ini memungkinkan NGO untuk merespons isu-isu global dengan lebih cepat dan inovatif.

Dalam diplomasi lingkungan internasional, peran NGO menjadi semakin menonjol. NGO berkontribusi dalam mendorong adopsi standar lingkungan dan komitmen internasional melalui advokasi berbasis sains dan nilai keberlanjutan. Mereka juga berperan dalam mengawasi implementasi kesepakatan internasional dan memastikan bahwa komitmen yang telah disepakati benar-benar dijalankan. Peran ini menunjukkan bahwa NGO tidak hanya berfungsi sebagai aktor pendukung, tetapi juga sebagai penjaga norma (norm watchdog) dalam tata kelola global.

Keberadaan NGO dalam diplomasi global juga mencerminkan perubahan paradigma mengenai legitimasi dalam hubungan internasional. Jika sebelumnya legitimasi terutama bersumber dari kedaulatan negara, maka dalam konteks kontemporer legitimasi juga diperoleh melalui representasi kepentingan publik global dan nilai-nilai universal. NGO memperoleh legitimasi dari klaim moral dan keahliannya dalam isu tertentu, yang sering kali diakui oleh aktor internasional lainnya. Hal ini memungkinkan NGO untuk berpartisipasi dalam forum-forum internasional dan memengaruhi agenda global secara substantif.

Dalam konteks Indonesia, peran NGO dalam diplomasi global semakin relevan seiring dengan meningkatnya keterlibatan negara dalam isu-isu pembangunan berkelanjutan dan tata kelola global. NGO Indonesia tidak hanya beroperasi di tingkat domestik, tetapi juga terlibat dalam jaringan internasional yang memperluas jangkauan pengaruhnya. Melalui partisipasi dalam forum global dan kemitraan lintas negara, NGO Indonesia berkontribusi dalam memperkenalkan perspektif dan nilai lokal ke dalam diskursus internasional.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa NGO merupakan aktor non-negara yang memiliki efektivitas signifikan dalam diplomasi global. Meskipun tidak memiliki kekuasaan formal seperti negara, NGO mampu memengaruhi proses internasional melalui legitimasi moral, keahlian tematik, dan jaringan kolaboratif. Peran ini menjadikan NGO sebagai agen penting dalam diplomasi soft power, terutama dalam isu-isu normatif seperti pembangunan berkelanjutan. Pemahaman mengenai efektivitas NGO ini menjadi landasan analitis untuk mengkaji peran United In Diversity sebagai aktor diplomasi nilai dalam konteks Indonesia dan internasional.

### **c. Perspektif Konstruktivisme dan Difusi Norma**

Munculnya United In Diversity (UID) sebagai aktor non-negara dalam konteks pembangunan berkelanjutan mencerminkan pergeseran praktik diplomasi yang semakin berbasis nilai dan kolaborasi lintas sektor. UID tidak beroperasi sebagai organisasi advokasi konvensional yang menekan pemerintah melalui kampanye politik, melainkan memosisikan diri sebagai forum edukatif dan katalis kepemimpinan yang menjembatani berbagai kepentingan. Karakter ini menempatkan UID pada posisi strategis dalam praktik diplomasi soft power, khususnya dalam upaya internasionalisasi nilai lokal Indonesia yang relevan dengan agenda global.

Secara historis, UID didirikan pada tahun 2003 sebagai hasil kolaborasi antara Massachusetts Institute of Technology (MIT) Sloan School of Management, Universitas Indonesia, dan GT Group Sinar Harapan. Sejak awal, UID dirancang sebagai ruang dialog lintas sektor yang mempertemukan pemerintah, sektor swasta, akademisi, masyarakat sipil, dan organisasi internasional. Model kelembagaan ini menunjukkan bahwa UID tidak hanya berfokus pada implementasi program, tetapi juga pada pembentukan pola interaksi dan kepemimpinan kolaboratif. Dalam konteks hubungan internasional, pendekatan semacam ini sejalan dengan pandangan bahwa NGO yang efektif adalah organisasi yang mampu membangun jaringan dan memfasilitasi kerja sama antaraktor dengan latar belakang kepentingan yang berbeda.

Peran UID sebagai aktor diplomasi nilai dapat dipahami melalui kemampuannya menerjemahkan agenda global, khususnya Sustainable Development Goals (SDGs), ke dalam konteks lokal Indonesia. SDGs sebagai agenda normatif global membutuhkan proses lokalisasi agar dapat diterima dan diimplementasikan secara efektif. Dalam hal ini, UID berfungsi sebagai perantara normatif yang menjembatani nilai global dan kearifan lokal. Peran ini sejalan dengan temuan dalam kajian NGO internasional yang menyebutkan bahwa organisasi non-pemerintah memiliki efektivitas tinggi ketika mampu menyesuaikan norma global dengan konteks sosial dan budaya lokal tempat mereka beroperasi.

UID tidak memosisikan diri sebagai aktor yang menggantikan peran negara, melainkan sebagai pelengkap yang memperluas ruang diplomasi di luar jalur formal pemerintahan. Dalam praktiknya, UID bekerja sama dengan lembaga pemerintah nasional, organisasi internasional, serta sektor swasta dalam berbagai inisiatif pembangunan berkelanjutan. Pola kerja ini mencerminkan model multi-stakeholder partnership yang menjadi ciri utama tata kelola global kontemporer, khususnya dalam implementasi SDGs. Literatur mengenai diplomasi NGO menegaskan bahwa kemitraan lintas sektor merupakan salah satu mekanisme utama bagi aktor non-negara untuk memperoleh legitimasi dan pengaruh dalam arena internasional.

Salah satu kontribusi utama UID dalam diplomasi nilai adalah kemampuannya membangun narasi pembangunan yang menekankan dimensi etis dan spiritual. Berbeda dengan pendekatan pembangunan yang semata-mata berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, UID mengarusutamakan konsep pembangunan berkelanjutan yang mencakup keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip dasar SDGs yang menekankan pembangunan inklusif dan prinsip “leave no one behind”. Dengan demikian, UID tidak hanya berkontribusi pada implementasi teknis SDGs, tetapi juga pada pembentukan makna dan pemahaman mengenai pembangunan berkelanjutan itu sendiri.

Dalam konteks diplomasi soft power, UID berperan sebagai agen penyebar nilai yang memiliki daya tarik di tingkat internasional. Daya tarik tersebut tidak berasal dari kekuatan material, melainkan dari nilai-nilai yang diusung dan relevansinya dengan tantangan global. Joseph S. Nye (2004) menegaskan bahwa soft power bekerja melalui legitimasi dan daya tarik nilai yang dianggap sah oleh pihak lain. UID memanfaatkan mekanisme ini dengan mengemas nilai lokal Indonesia dalam narasi universal yang selaras dengan diskursus global mengenai keberlanjutan dan tata kelola yang etis. Melalui pendekatan ini, UID berkontribusi pada pembentukan citra Indonesia sebagai negara yang memiliki komitmen normatif terhadap harmoni dan keberlanjutan.

Efektivitas UID sebagai aktor diplomasi nilai juga tercermin dari kemampuannya memfasilitasi dialog lintas aktor dalam forum-forum internasional. Melalui penyelenggaraan forum dan program kepemimpinan, UID menciptakan ruang interaksi yang memungkinkan pertukaran ide, pengalaman, dan praktik terbaik antaraktor dari berbagai negara. Dalam literatur hubungan internasional, proses



semacam ini dipahami sebagai bentuk sosialisasi norma, di mana nilai dan ide tertentu diperkenalkan, didiskusikan, dan secara bertahap diinternalisasi oleh aktor-aktor yang terlibat (Finnemore & Sikkink, 1998). Dengan demikian, aktivitas UID tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga memiliki implikasi normatif jangka panjang.

Peran UID sebagai aktor non-negara juga memperlihatkan bagaimana diplomasi tidak selalu harus dilakukan melalui representasi resmi negara. Dalam banyak kasus, pendekatan non-formal yang dilakukan oleh NGO justru lebih efektif dalam membangun kepercayaan dan membuka ruang kerja sama. Hal ini sejalan dengan pandangan Melissen (2005) yang menekankan pentingnya diplomasi publik dan aktor non-negara dalam membangun hubungan internasional yang berkelanjutan. UID, melalui pendekatan dialogis dan kolaboratif, mampu menjangkau audiens yang lebih luas dan beragam dibandingkan jalur diplomasi konvensional.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa United In Diversity merupakan contoh konkret aktor non-negara yang berperan signifikan dalam diplomasi nilai berbasis soft power. UID tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana program pembangunan, tetapi juga sebagai agen normatif yang membentuk wacana dan pemahaman mengenai pembangunan berkelanjutan di tingkat global. Dengan memanfaatkan jaringan lintas sektor dan nilai lokal yang relevan secara universal, UID berkontribusi pada perluasan praktik diplomasi Indonesia di luar kerangka negara-sentris. Analisis ini menjadi pijakan penting untuk memahami proses internasionalisasi nilai Tri Hita Karana sebagai sumber soft power Indonesia.

**d. Internasionalisasi Nilai Tri Hita Karana dalam Dinamika Diplomasi Nilai dan Interkonektivitas**

Internasionalisasi nilai Tri Hita Karana melalui inisiatif yang difasilitasi oleh United In Diversity (UID) menunjukkan bagaimana nilai lokal dapat diartikulasikan ke dalam diskursus global sebagai sumber soft power. Nilai Tri Hita Karana yang menekankan harmoni antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam memiliki kesesuaian normatif dengan agenda Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya dalam dimensi keberlanjutan lingkungan, keadilan sosial, dan tata kelola pembangunan yang inklusif. Melalui forum internasional dan penyusunan dokumen normatif seperti Tri Hita Karana Roadmap for Blended Finance, nilai tersebut tidak lagi diposisikan sebagai kearifan lokal semata, melainkan sebagai kerangka etis yang relevan dalam tata kelola global (OECD & Government of Indonesia, 2018).

Proses ini mencerminkan mekanisme diplomasi soft power sebagaimana dijelaskan oleh Nye (2004), di mana daya tarik nilai dan legitimasi moral menjadi sumber utama pengaruh. UID berperan sebagai perantara normatif yang menerjemahkan nilai lokal ke dalam bahasa universal yang dapat diterima oleh aktor internasional, termasuk pemerintah, organisasi internasional, dan sektor swasta. Dalam konteks ini, UID tidak bertindak sebagai representasi formal negara, tetapi sebagai aktor non-negara yang memperluas ruang diplomasi Indonesia melalui pendekatan kolaboratif dan non-koersif. Praktik tersebut menunjukkan bahwa diplomasi nilai dapat berlangsung secara efektif melalui jalur non-formal dan lintas sektor.

Interkonektivitas multi-sektor menjadi elemen kunci dalam praktik diplomasi nilai yang difasilitasi oleh UID. Keterlibatan pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan organisasi internasional mencerminkan model multi-stakeholder partnership yang menjadi ciri utama implementasi SDGs. Dalam perspektif teori sistem, relasi antaraktor ini bersifat saling bergantung dan membentuk satu kesatuan fungsional yang bertujuan mencapai pembangunan berkelanjutan. UID berfungsi sebagai simpul penghubung yang memungkinkan terjadinya koordinasi dan pertukaran kepentingan antar sektor, sehingga memperkuat legitimasi dan daya jangkauan inisiatif yang diusung.

Namun demikian, praktik diplomasi nilai oleh UID juga perlu dilihat secara kritis. Sebagai sebuah yayasan, UID tidak sepenuhnya berada di ruang yang netral dan bebas kepentingan. Literatur mengenai NGO dan diplomasi global menunjukkan bahwa organisasi non-pemerintah, meskipun sering dipersepsikan sebagai aktor moral, tetap beroperasi dalam struktur pendanaan, jaringan elite, dan relasi kekuasaan tertentu. Ketergantungan pada donor, mitra strategis, dan dukungan sektor swasta berpotensi memengaruhi arah narasi dan prioritas nilai yang dipromosikan. Dalam konteks ini, internasionalisasi Tri Hita Karana dapat dipertanyakan sejauh mana benar-benar merepresentasikan kepentingan publik yang luas, dan sejauh mana telah disesuaikan dengan kepentingan aktor-aktor dominan yang terlibat.

Pendekatan konstruktivisme membantu menjelaskan dinamika ini dengan melihat diplomasi nilai sebagai proses sosial yang melibatkan negosiasi makna, norma, dan identitas (Wendt, 1992). Difusi norma tidak berlangsung secara netral, melainkan melalui mekanisme sosialisasi yang dipengaruhi oleh relasi kekuasaan dan legitimasi. Finnemore dan Sikkink (1998) menjelaskan bahwa norma global sering kali dipromosikan oleh *norm entrepreneurs* yang memiliki sumber daya, akses, dan otoritas tertentu. Dalam hal ini, UID dapat diposisikan sebagai *norm entrepreneur* yang memfasilitasi penyebaran nilai Tri Hita Karana, tetapi sekaligus memiliki kapasitas untuk membingkai nilai tersebut sesuai dengan kepentingan strategis tertentu.

Implikasi dari kondisi ini adalah munculnya ambiguitas antara diplomasi nilai sebagai upaya normatif dan diplomasi nilai sebagai instrumen kepentingan. Di satu sisi, UID berkontribusi positif dalam memperkenalkan nilai lokal Indonesia ke tingkat global dan memperkuat citra Indonesia sebagai negara yang menjunjung harmoni dan keberlanjutan. Di sisi lain, terdapat risiko bahwa nilai lokal tersebut mengalami depolitisasi atau simplifikasi agar sesuai dengan agenda global dan kepentingan mitra tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa diplomasi nilai oleh aktor non-negara tidak sepenuhnya bebas dari kepentingan, melainkan berada dalam spektrum antara idealisme normatif dan pragmatisme institusional.

Dengan demikian, praktik internasionalisasi Tri Hita Karana melalui UID dapat dipahami sebagai bentuk diplomasi *soft power* yang efektif sekaligus problematis. Efektif karena mampu membangun daya tarik dan legitimasi normatif Indonesia di tingkat global, tetapi problematis karena membuka ruang bagi kepentingan non-publik yang terselubung dalam narasi nilai. Analisis ini menegaskan bahwa peran NGO dalam diplomasi global perlu dipahami secara kritis, tidak hanya sebagai agen moral, tetapi juga sebagai aktor politik non-negara yang beroperasi dalam struktur kekuasaan dan kepentingan tertentu.

## Kesimpulan

Perkembangan hubungan internasional kontemporer menunjukkan bahwa diplomasi tidak lagi dapat dipahami secara sempit sebagai aktivitas yang dijalankan secara eksklusif oleh negara. Kompleksitas isu global, khususnya dalam agenda pembangunan berkelanjutan, telah membuka ruang yang lebih luas bagi keterlibatan aktor non-negara dalam proses diplomasi. Dalam konteks ini, konsep *soft power* menjadi kerangka yang relevan untuk memahami bagaimana nilai, norma, dan legitimasi moral dapat berfungsi sebagai sumber pengaruh dalam politik global.

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, penelitian ini menunjukkan bahwa United In Diversity (UID) berperan signifikan sebagai aktor non-negara dalam praktik diplomasi *soft power* berbasis nilai lokal melalui internasionalisasi Tri Hita Karana. UID tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana program pembangunan, tetapi juga sebagai mediator normatif yang

menerjemahkan nilai lokal ke dalam narasi universal yang sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDGs). Melalui forum internasional dan kerangka normatif seperti Tri Hita Karana Roadmap for Blended Finance, nilai Tri Hita Karana diposisikan sebagai prinsip etis yang relevan dalam tata kelola pembangunan global.

Namun demikian, penelitian ini juga menegaskan pentingnya melihat peran UID secara kritis. Sebagai sebuah yayasan, UID tidak sepenuhnya berada di ruang yang bebas kepentingan. Keterlibatan donor, mitra strategis, dan sektor swasta membuka kemungkinan terjadinya penyelarasan nilai dengan kepentingan tertentu. Kondisi ini menunjukkan bahwa diplomasi nilai oleh aktor non-negara berada dalam spektrum antara idealisme normatif dan pragmatisme institusional. Oleh karena itu, diplomasi soft power berbasis nilai lokal tidak dapat dipahami semata-mata sebagai praktik moral, melainkan juga sebagai proses politik yang melibatkan negosiasi makna, legitimasi, dan kepentingan.

Dari perspektif konstruktivisme, internasionalisasi Tri Hita Karana mencerminkan proses difusi norma dan pembentukan identitas Indonesia di tingkat global. Identitas tersebut tidak dibangun melalui klaim sepihak, melainkan melalui pengakuan dan partisipasi aktor internasional terhadap nilai yang ditawarkan. Dalam hal ini, peran UID sebagai norm entrepreneur berkontribusi pada pembentukan citra Indonesia sebagai negara yang menjunjung harmoni dan keberlanjutan, sekaligus memperlihatkan batas-batas dan tantangan dari diplomasi nilai yang dijalankan oleh aktor non-negara.

Secara akademik, penelitian ini memperkaya kajian hubungan internasional dengan menyoroti peran NGO dalam diplomasi soft power dan pentingnya nilai lokal dalam diskursus global. Secara praktis, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa keterlibatan aktor non-negara dalam diplomasi perlu diiringi dengan transparansi dan refleksi kritis agar nilai yang diusung tidak kehilangan makna publiknya. Dengan demikian, diplomasi nilai berbasis aktor non-negara dapat berkontribusi secara lebih akuntabel dalam tata kelola global yang berkelanjutan.

## **Daftar Pustaka**

- Betsill, M. M., & Corell, E. (2008). NGO diplomacy: The influence of nongovernmental organizations in international environmental negotiations. MIT Press.*
- Finnemore, M., & Sikkink, K. (1998). International norm dynamics and political change. International Organization, 52(4), 887–917.*
- Melissen, J. (2005). The new public diplomacy: Soft power in international relations. Palgrave Macmillan.*
- Nye, J. S. (2004). Soft power: The means to success in world politics. PublicAffairs.*
- OECD & Government of Indonesia. (2018). Tri Hita Karana roadmap for blended finance. OECD Publishing.*

- Putra, M. B., Britama, M., & Pradana, R. A. (2020). *Analisis multi-stakeholder partnership dalam pengurangan deforestasi lahan gambut di Kalimantan Tengah tahun 2017–2020*. *Jurnal Hubungan Internasional*, 13(2), 145–162.
- Saud, I. W., Wardaty, S., & Ahmad, R. (2019). *Analisis peran 'Aisyiyah Wilayah Gorontalo dalam mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs)*. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 8(1), 67–82.
- Dharma, D. P. B., Nugraha, A. A. B. S. W., & Dewi, A. P. G. K. (2022). *Interkonektivitas multi sektor dalam upaya pencapaian agenda SDGs 2030 (United In Diversity)*. Universitas Udayana.
- United Nations. (2015). *Transforming our world: The 2030 agenda for sustainable development*. United Nations.
- Wendt, A. (1992). *Anarchy is what states make of it: The social construction of power politics*. *International Organization*, 46(2), 391–425.

### Catatan Kaki

- <sup>1</sup> Soft power dalam kajian hubungan internasional merujuk pada kemampuan suatu aktor untuk memengaruhi preferensi pihak lain melalui daya tarik nilai, budaya, dan legitimasi kebijakan, bukan melalui paksaan militer atau insentif material (Nye, 2004).
- <sup>2</sup> Aktor non-negara dalam tulisan ini dipahami sebagai entitas di luar struktur negara yang memiliki kapasitas untuk memengaruhi proses politik internasional, termasuk organisasi non-pemerintah, organisasi internasional, dan jaringan masyarakat sipil (Wendt, 1992).
- <sup>3</sup> Organisasi non-pemerintah (NGO) tidak bersifat homogen dan memiliki variasi fungsi, orientasi, serta tingkat keterlibatan politik, sehingga efektivitas dan legitimasi NGO perlu dianalisis secara kontekstual (Betsill & Corell, 2008).
- <sup>4</sup> Konsep diplomasi publik menekankan bahwa diplomasi tidak hanya ditujukan kepada pemerintah asing, tetapi juga kepada publik internasional melalui penyebaran nilai dan pembentukan persepsi jangka panjang (Melissen, 2005).
- <sup>5</sup> Tri Hita Karana merupakan filosofi lokal Bali yang menekankan harmoni antara manusia dengan Tuhan (parahyangan), sesama manusia (pawongan), dan alam (palemahan), yang dalam konteks global diposisikan sebagai nilai etis pembangunan berkelanjutan (OECD & Government of Indonesia, 2018).
- <sup>6</sup> Dalam perspektif konstruktivisme, norma internasional terbentuk melalui proses interaksi sosial dan sosialisasi, di mana aktor tertentu berperan sebagai norm entrepreneur yang mempromosikan nilai dan standar perilaku baru (Finnemore & Sikkink, 1998).
- <sup>7</sup> United In Diversity (UID) diposisikan sebagai aktor non-negara yang berperan sebagai mediator lintas sektor dalam implementasi agenda SDGs di Indonesia, khususnya melalui pendekatan kolaboratif dan forum dialog multi-pemangku kepentingan (United In Diversity, 2023).
- <sup>8</sup> Praktik multi-stakeholder partnership dalam agenda pembangunan berkelanjutan mencerminkan keterhubungan peran pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan organisasi internasional dalam mencapai tujuan bersama (United Nations, 2015).
- <sup>9</sup> Meskipun sering dipersepsikan sebagai aktor moral, NGO tetap beroperasi dalam struktur pendanaan dan relasi kekuasaan tertentu, sehingga terdapat potensi penyelarasan nilai dengan kepentingan institusional atau donor (Unsworth, 2023).

<sup>10</sup> Oleh karena itu, diplomasi nilai oleh NGO perlu dipahami secara kritis sebagai proses politik yang melibatkan negosiasi makna, legitimasi, dan kepentingan, bukan semata-mata praktik normatif yang netral (Finnemore & Sikkink, 1998; Betsill & Corell, 2008).